

BAB III

METODA PENELITIAN

3.1. Strategi Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah dengan obyek yang diteliti adalah APBD dan Laporan Realisasi Anggaran & Belanja Daerah Kota Bekasi periode 2016-2019. Penelitian ini termasuk sebagai penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual (Sugiyono, 2011) dan Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Suharsimi (2002), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi tahun anggaran 2016-2019

3.2.2. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014: 120) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. sampel peneliti ini menggunakan metode *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu atau menghasilkan sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi. Penetapan sampel pada penelitian ini yaitu memiliki kriteria laporan keuangan yang sebelumnya sudah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Penelitian ini menggunakan data *time series* Pemerintah Daerah Kota Bekasi pada tahun 2016-2019 yaitu berupa data realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3.3. Metoda Pengumpulan data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah dokumentasi. Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder. Metode teknik analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diberikan pada pengumpul data, misalnya teknik pengumpulan data dengan cara mencatat, menggandakan, *mengcopy*, membaca, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen penelitian yang menggunakan data sekunder adalah penelitian arsip dimana datanya menggambarkan kejadian masa lalu (Indriantoro dan Supomo, 2002).

Adapun teknik pengumpulan data yang diperoleh berupa laporan keuangan yang diterbitkan oleh beberapa instansi yaitu:

1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id).
2. Badan Pusat Statistik (BPS)
3. Pemerintahan Kota Bekasi.

3.4. Operasional Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudia dipelajari sehingga memperoleh informasi mengenai hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Variabel juga dapat merupakan atribut dan bidang keilmuan atau kegiatan tertentu (Sugiyono, 2018).

Pada penelitian ini terdapat satu variabel terikat (dependen) (Y) dan tiga variabel bebas (independen) (X). Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas (independen). Variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Sedangkan variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain (Sanusi,2014). Jadi istilah variabel terikat dan variabel bebas ini hanya dalam hubungan antar variabel yang bersifat kausalitas. Variabel bebas (independen)

dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian (X_1), rasio eefektivitas pendapatan asli daerah (X_2), dan rasio efesiensi belanja daerah (X_3).

1. Variabel Dependen (Y)

a. Kinerja keuangan pemerintah daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran daerah dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menurut Hendro Sumarjo dalam Tyas Nurulafifah (2012).

2. Variabel Independen (X)

a. Rasio kemandirian Daerah (X_1)

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2007).

b. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (X_2)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang sumbernya dari daerah tersebut. Pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cakupannya yaitu terdiri dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

c. Rasio efesiensi Belanja Daerah (X_3)

Standar akuntansi pemerintahan, belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. (Mahmudi: 2010).

3.5. Metoda Analisa Data

1. Rasio kemandirian

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Mahmudi, 2010: 140).

Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan rasio kemandirian daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pola Hubungan dan Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

| Kemampuan / Ketergantungan Keuangan Daerah | Presentase | Pola Hubungan |
|---|-------------------|----------------------|
| Rendah sekali | 0% - 25% | Instruktif |
| Rendah | 25% - 50% | Konsultatif |
| Sedang | 50% - 75% | Partisipatif |
| Tinggi | 75% - 100% | Delegatif |

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 29 tahun 2002.

- a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahmudi (2007: 129) Rasio efektifitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).

Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan rasio efektifitas pendapatan asli daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.2. Presentase Efektifitas PAD dan Kriteria Tingkat Pendapatan Asli Daerah

| Presentase Efektifitas PAD | Kriteria Pendapatan Asli Daerah |
|----------------------------|---------------------------------|
| < 75% | Tidak Efektifitas |
| 75% - 89% | Kurang Efektifitas |
| 90% - 99% | Cukup Efektifitas |
| 100% | Efektifitas |
| > 100% | Sangat Efektifitas |

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327, 1996.

3. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Standar akuntansi pemerintahan, belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. (Mahmudi: 2010). Rasio ini berguna untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100% atau sebaliknya.

Rumus rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan rasio efisiensi belanja daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.3. Presentase Efisiensi Belanja Daerah dan Kriteria Tingkat Efisiensi Belanja Daerah

| Presentase Efisiensi Belanja Daerah | Kriteria Belanja Daerah |
|--|--------------------------------|
| 100% Keatas | Tidak Efisiensi |
| 90% - 100% | Kurang Efisiensi |
| 80% - 90% | Cukup Efisiensi |
| 70% - 80% | Efisiensi |
| Kurang dari 60% | Sangat Efisiensi |

Sumber : Suhaedi, W. (2019)